

Dampak Kebijakan Pendidikan Gratis Bagi Masyarakat Dengan Kategori Keluarga Miskin Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Malang

Wijianto^{1*}, Sapto Pramono², Ika Devy Pramudiana³, Nihayatus Sholichah⁴

¹⁻⁴Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

Article Info: Accepted: 26 July 2025; Approve: 31 July 2025; Published: 3 August 2025

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan pendidikan gratis terhadap keluarga miskin dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Malang. Kebijakan ini dirancang untuk menghilangkan hambatan ekonomi dalam akses pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin, melalui program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Penelitian ini juga mengevaluasi implementasi kebijakan yang dampaknya pada kualitas pendidikan, serta kendala yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan gratis telah meningkatkan angka partisipasi sekolah, khususnya di jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama. Banyak anak dari keluarga miskin yang sebelumnya putus sekolah kini dapat melanjutkan pendidikan mereka. Selain itu, kebijakan ini juga membantu menurunkan angka putus sekolah dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, kesenjangan kualitas antara sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan, serta kurangnya infrastruktur yang memadai. Kualitas pendidikan juga dipengaruhi oleh kekurangan guru kompeten, minimnya pelatihan bagi tenaga pendidik, serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan peningkatan alokasi dana pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan penguatan pelatihan guru. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga menjadi kunci keberhasilan program ini. Kesimpulannya, meskipun pendidikan gratis telah membawa perubahan positif, upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan perlu terus dilakukan untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh semua lapisan masyarakat.

Kata Kunci: Pendidikan Gratis; Kualitas Pendidikan; Kebijakan Pendidikan; Keluarga Miskin.

Correspondence Author: Wijianto

Email: ika.devy@unitomo.ac.id

This is an open access article under the [CC BY SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan suatu bangsa. Sebagai pilar utama dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, produktif, dan daya saing. Tantangan dalam pemerataan akses dan kualitas pendidikan masih menjadi isu utama di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Salah satu permasalahan yang terus dihadapi adalah ketidakmampuan sebagian masyarakat, khususnya dari keluarga miskin, untuk mengakses pendidikan yang layak. Ketidakmampuan ini seringkali diakibatkan oleh kendala ekonomi yang menyebabkan anak-anak dari keluarga miskin tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Hamid, 2012; Siregar, 2020). Kebijakan pendidikan gratis merupakan salah satu langkah strategis yang diambil pemerintah untuk mengatasi

hambatan ekonomi dalam akses pendidikan. Melalui program ini, diharapkan anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh hak pendidikan yang sama dengan kelompok masyarakat lainnya. Pendidikan gratis mencakup berbagai komponen, seperti pembebasan biaya sekolah, pemberian bantuan buku, seragam, hingga subsidi transportasi. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan akibat faktor ekonomi.

Kebijakan pendidikan gratis di Indonesia mulai diterapkan secara luas setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menegaskan pentingnya pendidikan sebagai hak setiap warga negara tanpa terkecuali. Program-program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan wujud nyata dari kebijakan ini. Dengan adanya BOS, sekolah-sekolah dapat mengelola dana operasional tanpa membebankan biaya kepada siswa, sedangkan KIP memberikan bantuan langsung kepada siswa dari keluarga miskin untuk mendukung kebutuhan pendidikan mereka. Namun, meskipun kebijakan pendidikan gratis telah berjalan selama beberapa dekade, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Masalah seperti distribusi bantuan yang tidak merata, kurangnya kualitas infrastruktur pendidikan, serta minimnya dukungan dari pihak-pihak terkait sering kali menjadi penghambat keberhasilan kebijakan ini. Selain itu, banyak keluarga miskin yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pendidikan, sehingga mendorong mereka untuk memprioritaskan pekerjaan dibandingkan melanjutkan sekolah (Septiani et al., 2024).

Dampak kebijakan pendidikan gratis perlu dikaji secara mendalam untuk menilai sejauh mana program ini berhasil meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dari keluarga miskin. Sebagai salah satu indikator keberhasilan, peningkatan angka partisipasi sekolah dari kelompok masyarakat miskin merupakan hal yang penting untuk dievaluasi. Angka partisipasi ini mencakup peningkatan jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, menurunnya angka putus sekolah, serta meningkatnya prestasi akademik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak kebijakan pendidikan gratis terhadap keluarga miskin dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan dapat diukur melalui beberapa aspek, seperti peningkatan kompetensi siswa, penguatan karakter, serta kemampuan siswa untuk bersaing di dunia kerja. Selain itu, penelitian ini juga akan menelaah bagaimana kebijakan ini berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi yang diakibatkan oleh perbedaan tingkat pendidikan. Secara teoritis, pendidikan gratis seharusnya mampu mendorong mobilitas sosial, di mana anak-anak dari keluarga miskin memiliki peluang untuk meningkatkan taraf hidup mereka melalui pendidikan. Dengan pendidikan yang lebih baik, mereka diharapkan mampu mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, sehingga dapat memutus rantai kemiskinan yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, dalam kenyataannya, banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan ini, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat, dan kendala budaya (Safarah & Wibowo, 2018; Lorensa et al., 2023).

Dampak kebijakan pendidikan gratis juga harus dilihat dari sisi sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan. Dengan adanya subsidi dari pemerintah, sekolah diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan, seperti memperbaiki fasilitas belajar, meningkatkan kompetensi guru, dan menyediakan program pembelajaran yang inovatif. Namun, tantangan sering muncul ketika alokasi dana yang diterima tidak mencukupi kebutuhan sekolah atau penggunaannya kurang efektif. Selain itu, faktor budaya dan sosial juga memainkan peran penting dalam keberhasilan kebijakan ini. Beberapa keluarga miskin, terutama di daerah

pedesaan, masih memandang pendidikan sebagai hal yang kurang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Mereka cenderung memprioritaskan anak-anak untuk membantu pekerjaan rumah tangga atau bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan gratis perlu diiringi dengan upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan (Sudarman et al., 2020).

Kualitas pendidikan yang diberikan juga menjadi isu yang perlu diperhatikan. Pendidikan gratis yang hanya berfokus pada akses tanpa memperhatikan kualitas dapat berujung pada output yang kurang memadai. Dalam beberapa kasus, sekolah-sekolah yang mengandalkan dana BOS seringkali menghadapi keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga pengajar yang kompeten, serta minimnya program pengembangan siswa. Kondisi ini dapat menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan, sehingga manfaat dari kebijakan pendidikan gratis tidak dirasakan secara optimal. Dengan memperhatikan kompleksitas tersebut, penting untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap dampak kebijakan pendidikan gratis. Evaluasi ini tidak hanya melibatkan analisis kuantitatif, seperti angka partisipasi dan tingkat kelulusan, tetapi juga kajian kualitatif yang mendalam mengenai pengalaman siswa, guru, dan keluarga miskin dalam mengakses pendidikan. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada (Kusumajati & Kurniawan, 2019).

Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya mengenai langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pendidikan gratis. Beberapa rekomendasi yang mungkin mencakup peningkatan alokasi dana pendidikan, penguatan kapasitas sekolah, serta penyelenggaraan program-program pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pendidikan. Dalam jangka panjang, keberhasilan kebijakan pendidikan gratis diharapkan mampu memberikan dampak positif tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan yang lebih baik akan menciptakan generasi yang lebih berkualitas, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Dengan demikian, pendidikan gratis bukan hanya sebuah kebijakan, tetapi juga investasi untuk masa depan bangsa (Dahlan, 2013; Khaidir et al., 2023).

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang sejauh mana kebijakan pendidikan gratis telah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi keluarga miskin, serta bagaimana kebijakan ini dapat diperbaiki untuk mencapai tujuan yang lebih maksimal.

Kajian Teori

Landasan teori penelitian ini bertumpu pada konsep keadilan sosial dalam pendidikan yang menekankan pentingnya akses pendidikan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok miskin. Pendidikan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara, karena melalui pendidikan, individu dapat meningkatkan kualitas hidup, memperbaiki kondisi sosial-ekonomi, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Menurut Tilaar (2012), kebijakan pendidikan gratis merupakan bentuk intervensi negara untuk mengatasi ketimpangan akses pendidikan dan menciptakan keadilan sosial. Oleh karena itu, pendidikan gratis menjadi instrumen penting dalam mendobrak hambatan ekonomi yang dihadapi oleh keluarga miskin untuk menyekolahkan anak-anaknya.

Lebih lanjut, pendekatan ekonomi pendidikan menegaskan bahwa investasi dalam pendidikan akan memberikan keuntungan jangka panjang, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Becker (1993) menyatakan bahwa pendidikan merupakan

bentuk dari human capital investment yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan gratis tidak hanya bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga miskin, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan angka partisipasi sekolah dan hasil belajar siswa. Dengan demikian, kebijakan ini menjadi fondasi penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri.

Namun, agar kebijakan pendidikan gratis benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan, maka perlu didukung oleh faktor-faktor lain seperti kualitas guru, fasilitas pembelajaran, serta manajemen pendidikan yang efektif. Seperti yang dikemukakan oleh UNESCO (2021), akses pendidikan yang luas harus disertai dengan peningkatan mutu agar tidak terjadi trade-off antara kuantitas dan kualitas. Di Kabupaten Malang, implementasi kebijakan ini perlu dilihat secara komprehensif, karena meskipun biaya pendidikan telah dihapuskan, tantangan lain seperti ketersediaan sarana prasarana dan kesiapan tenaga pendidik masih menjadi faktor penentu keberhasilan program.

Selanjutnya, dari perspektif sosiologis, pendidikan gratis bagi keluarga miskin memiliki peran penting dalam mengurangi eksklusi sosial dan mendorong mobilitas sosial. Bourdieu (1990) menjelaskan bahwa pendidikan dapat menjadi sarana transformasi sosial apabila difasilitasi oleh kebijakan yang mampu menjangkau kelompok marjinal. Oleh sebab itu, pendidikan gratis tidak hanya berfungsi sebagai alat pemerataan ekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme penguatan modal sosial dan budaya dalam keluarga miskin. Ketika anak-anak dari latar belakang ekonomi rendah dapat mengakses pendidikan yang bermutu, maka mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk keluar dari siklus kemiskinan struktural.

Dengan memperhatikan seluruh aspek tersebut, maka kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Malang harus dipahami sebagai kebijakan strategis yang tidak hanya fokus pada penghapusan biaya sekolah, tetapi juga menitikberatkan pada penciptaan sistem pendidikan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkualitas. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mendukung lingkungan belajar yang kondusif. Sejalan dengan pandangan Supriadi (2020), peningkatan kualitas pendidikan di daerah tertinggal atau miskin tidak dapat dicapai hanya dengan pendekatan administratif, melainkan harus diiringi dengan pemberdayaan semua pemangku kepentingan untuk menciptakan transformasi pendidikan yang menyeluruh.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Malang. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan wawancara terhadap Dinas Pendidikan dan pengumpulan data, selain itu juga menggunakan kajian kepustakaan berupa jurnal-jurnal penelitian, dokumen-dokumen, buku-buku literatur dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan tema pokok pembahasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis interaktif yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

a. Landasan Pendidikan Gratis

Pendidikan gratis di Indonesia didasarkan pada hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31. Kebijakan ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pemerintah wajib menyediakan pendidikan dasar secara gratis untuk semua anak. Pendidikan gratis bertujuan untuk mengatasi hambatan ekonomi dalam mengakses pendidikan, terutama bagi kelompok keluarga miskin, dengan tujuan meningkatkan angka partisipasi sekolah dan memperbaiki kualitas SDM nasional. Pendidikan gratis mencakup pembebasan biaya pendidikan, pemberian bantuan buku, seragam, hingga transportasi. Program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) menjadi tulang punggung implementasi kebijakan ini. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan keadilan sosial dan mendorong mobilitas ekonomi melalui akses pendidikan yang lebih merata.

Pelaksanaan pendidikan gratis menghadapi berbagai tantangan, seperti alokasi dana yang terbatas, infrastruktur pendidikan yang kurang memadai, dan kualitas pendidikan yang belum merata. Kebijakan ini juga harus disertai dengan penguatan kapasitas sekolah, peningkatan kualitas tenaga pengajar, serta penyadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Landasan utama dari kebijakan pendidikan gratis adalah prinsip pemerataan pendidikan yang menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan tanpa memandang latar belakang sosial-ekonomi. Ketimpangan akses pendidikan yang terjadi selama ini seringkali memperparah kesenjangan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan gratis menjadi instrumen penting untuk menciptakan keadilan sosial dan memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan kesempatan yang setara dengan kelompok lainnya.

Kebijakan pendidikan gratis berkaitan erat dengan komitmen Indonesia terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan keempat yang bertujuan untuk memastikan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas bagi semua. Dalam kerangka ini, pendidikan gratis merupakan upaya strategis untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal dalam mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas, sehingga mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Fokus utama pendidikan gratis adalah pada jenjang pendidikan dasar karena dianggap sebagai fondasi utama untuk jenjang pendidikan berikutnya. Pemerintah memastikan bahwa seluruh anak usia sekolah memiliki akses untuk menyelesaikan pendidikan dasar melalui penghapusan hambatan finansial. Kebijakan ini juga mencakup penyediaan fasilitas dan dukungan tambahan, seperti pemberian buku, seragam, dan subsidi transportasi, agar pendidikan dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat di berbagai lapisan.

Salah satu tujuan utama dari pendidikan gratis adalah peningkatan tingkat literasi dan numerasi. Dua indikator ini sering digunakan sebagai ukuran kualitas pendidikan suatu negara. Dengan adanya pendidikan gratis, pemerintah berupaya memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin memiliki kemampuan dasar literasi dan numerasi yang setara dengan anak-anak dari keluarga yang lebih mampu secara ekonomi. Hal ini diharapkan mampu mendorong mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan gratis juga merupakan sarana penting untuk memfasilitasi mobilitas sosial dan ekonomi. Melalui pendidikan, anak-anak dari keluarga miskin memiliki peluang untuk meningkatkan taraf hidup mereka di masa depan. Pendidikan yang layak memberikan mereka keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk bersaing di dunia kerja, sehingga membantu memutus rantai kemiskinan yang seringkali bersifat antargenerasi. Salah satu dampak yang diharapkan dari pendidikan gratis adalah penurunan angka putus sekolah, yang selama ini menjadi masalah serius di kalangan keluarga miskin. Hambatan finansial sering menjadi alasan utama mengapa

banyak anak tidak dapat melanjutkan pendidikan. Dengan menghilangkan biaya sekolah, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan lebih besar untuk menyelesaikan pendidikan mereka.

Pendidikan gratis memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa pemerintah wajib menyediakan pendidikan dasar secara gratis bagi seluruh warga negara. Selain itu, kebijakan ini juga diperkuat oleh berbagai peraturan daerah yang menyesuaikan implementasinya dengan kebutuhan lokal. Dalam pelaksanaannya, pendidikan gratis melibatkan peran pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat menyediakan regulasi dan anggaran utama melalui program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sementara pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pengelolaan dan implementasi program tersebut sesuai dengan kondisi lokal. Kerja sama yang baik antara kedua pihak ini menjadi kunci keberhasilan kebijakan pendidikan gratis.

Aspek inklusivitas juga menjadi perhatian dalam kebijakan pendidikan gratis. Anak-anak berkebutuhan khusus sering kali menghadapi hambatan lebih besar dalam mengakses pendidikan. Dengan adanya pendidikan gratis, mereka diakomodasi melalui sekolah inklusi, yang dirancang untuk memberikan akses dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga memastikan bahwa tidak ada kelompok yang tertinggal. Selain membebaskan biaya pendidikan formal, pendidikan gratis juga mencakup penghapusan biaya tidak langsung yang sering menjadi beban tambahan bagi keluarga miskin. Biaya seperti seragam, buku, dan transportasi sering kali menjadi penghalang utama dalam akses pendidikan. Oleh karena itu, program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dirancang untuk memberikan bantuan langsung kepada siswa untuk kebutuhan tersebut.

Kebijakan ini juga memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik. Dengan adanya subsidi operasional dari dana BOS, pemerintah berharap sekolah dapat meningkatkan insentif bagi para guru, terutama di daerah terpencil. Kesejahteraan guru yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengajaran di sekolah, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Pendidikan gratis mencerminkan pandangan bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia yang harus diakui dan dihormati oleh semua pihak. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab kolektif yang harus dijamin oleh negara. Dengan memberikan akses pendidikan secara gratis, pemerintah berupaya memastikan bahwa hak dasar ini dapat dinikmati oleh semua anak, tanpa terkecuali. Selain memberikan akses, kebijakan pendidikan gratis juga berorientasi pada peningkatan efisiensi dan transparansi pengelolaan dana pendidikan. Program seperti BOS telah dirancang dengan mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai tujuan dan memberikan dampak maksimal pada peningkatan kualitas pendidikan.

Pendidikan gratis juga memiliki tujuan jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. Dengan memastikan bahwa setiap anak mendapatkan pendidikan yang layak, kebijakan ini berkontribusi pada pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Generasi yang terdidik diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Di sisi lain, pendidikan gratis juga merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat, terutama bagi kelompok marginal. Dengan memberikan pendidikan, masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Pendidikan yang inklusif dan merata

menciptakan masyarakat yang lebih kuat, yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas bangsa.

Oleh karena itu, pendidikan gratis bukan sekadar kebijakan untuk meningkatkan akses pendidikan, tetapi juga investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Kebijakan ini memberikan peluang bagi generasi muda untuk mewujudkan potensi mereka, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan daya saing nasional. Dengan landasan yang kuat dan implementasi yang efektif, pendidikan gratis menjadi salah satu langkah strategis untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berdaya saing tinggi.

b. Pendidikan Gratis di Kabupaten Malang

Kabupaten Malang sebagai salah satu daerah di Indonesia telah menerapkan kebijakan pendidikan gratis melalui alokasi dana dari APBD dan program BOS. Implementasi ini melibatkan kerjasama pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat. Fokus utama adalah pendidikan dasar dan menengah pertama untuk mengurangi angka putus sekolah. Pendidikan gratis di Kabupaten Malang telah membantu meningkatkan angka partisipasi sekolah, terutama di wilayah pedesaan. Namun, terdapat tantangan signifikan dalam pemerataan fasilitas dan sumber daya pendidikan. Sebagian sekolah menghadapi kekurangan tenaga pengajar, sementara yang lain terkendala infrastruktur. Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang berkomitmen menjalankan kebijakan pendidikan gratis, terutama untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama. Kebijakan ini diimplementasikan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dialokasikan oleh pemerintah pusat dan ditambah dengan anggaran dari pemerintah daerah. Upaya ini bertujuan untuk memastikan seluruh anak usia sekolah di Kabupaten Malang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan, tanpa terkendala oleh faktor ekonomi.

Pendidikan gratis di Kabupaten Malang telah memberikan dampak positif terhadap angka partisipasi sekolah. Banyak anak-anak dari keluarga miskin yang sebelumnya mengalami putus sekolah kini dapat melanjutkan pendidikan mereka hingga lulus. Hal ini terlihat dari meningkatnya angka melanjutkan dari SD ke SMP dan dari SMP ke SMA di berbagai wilayah, terutama di daerah-daerah pedesaan. Kesuksesan ini tidak lepas dari peran aktif pemerintah daerah dalam mendorong implementasi kebijakan yang merata. Selain mendukung pembebasan biaya pendidikan, program pendidikan gratis di Kabupaten Malang juga mencakup penyediaan bantuan lain seperti buku pelajaran, seragam, dan perlengkapan sekolah. Program ini memberikan kelegaan bagi keluarga-keluarga miskin yang sering kali tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Pemberian bantuan ini juga membantu mengurangi beban psikologis siswa dari keluarga kurang mampu, sehingga mereka dapat belajar dengan lebih fokus tanpa merasa terpinggirkan.

Implementasi pendidikan gratis di Kabupaten Malang tidak lepas dari tantangan. Salah satu kendala utama adalah kesenjangan kualitas antara sekolah-sekolah di perkotaan dan pedesaan. Sekolah di daerah perkotaan cenderung memiliki fasilitas yang lebih baik, tenaga pengajar yang lebih kompeten, serta akses yang lebih mudah terhadap program-program pelatihan guru. Sebaliknya, banyak sekolah di daerah pedesaan yang masih kekurangan infrastruktur dan sarana pendukung pendidikan lainnya. Keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan yang cukup serius. Meski dana BOS cukup membantu dalam menutupi kebutuhan operasional sekolah, jumlahnya sering kali tidak mencukupi untuk perbaikan infrastruktur atau pengadaan fasilitas tambahan. Beberapa sekolah bahkan masih bergantung pada sumbangan

sukarela dari masyarakat untuk menutup kekurangan dana tersebut, yang dapat bertentangan dengan semangat pendidikan gratis itu sendiri.

Pendidikan gratis di Kabupaten Malang juga menghadapi masalah dalam hal distribusi dana yang sering kali tidak merata. Sekolah-sekolah dengan jumlah siswa yang besar cenderung menerima dana yang lebih besar, sementara sekolah kecil di daerah terpencil sering kali kekurangan alokasi. Padahal, sekolah di daerah terpencil sering membutuhkan dukungan lebih besar untuk memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan mereka. Upaya lain yang dilakukan pemerintah Kabupaten Malang dalam mendukung pendidikan gratis adalah pengadaan program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program ini memberikan bantuan langsung kepada siswa dari keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Namun, pelaksanaan program ini juga menghadapi kendala, terutama dalam memastikan bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak. Beberapa laporan menyebutkan adanya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran KIP, yang mengakibatkan beberapa siswa yang sangat membutuhkan justru tidak menerima bantuan.

Pendidikan gratis di Kabupaten Malang juga berusaha menjangkau anak-anak dengan kebutuhan khusus melalui pengembangan sekolah inklusi. Sekolah-sekolah ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan yang setara bagi anak-anak berkebutuhan khusus, dengan menyediakan fasilitas yang sesuai dan tenaga pengajar yang terlatih. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan pendidikan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Dalam konteks peningkatan kualitas pendidikan, pendidikan gratis di Kabupaten Malang berusaha untuk tidak hanya memberikan akses, tetapi juga memperbaiki hasil belajar siswa. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan pelatihan kepada guru-guru untuk meningkatkan kompetensi mereka. Namun, pelatihan ini sering kali terkendala oleh minimnya anggaran dan jadwal yang kurang fleksibel, sehingga belum dapat diakses oleh semua guru.

Masalah lain yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan gratis di Kabupaten Malang adalah rendahnya kesadaran masyarakat, terutama di daerah pedesaan, akan pentingnya pendidikan. Beberapa keluarga masih memandang pendidikan sebagai sesuatu yang kurang relevan, terutama ketika mereka membutuhkan anak-anak untuk membantu pekerjaan di rumah atau bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Pandangan ini menjadi tantangan besar dalam upaya memastikan semua anak dapat mengakses pendidikan. Meskipun demikian, pendidikan gratis di Kabupaten Malang telah memberikan dampak positif yang signifikan, terutama dalam meningkatkan angka melek huruf di masyarakat. Program ini juga berhasil menurunkan angka putus sekolah di berbagai wilayah, yang sebelumnya menjadi masalah besar di daerah-daerah terpencil. Dampak ini mencerminkan bahwa kebijakan pendidikan gratis, meskipun memiliki banyak tantangan, telah membawa perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat miskin.

Dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan sektor swasta, sangat penting dalam memastikan keberhasilan pendidikan gratis di Kabupaten Malang. Beberapa inisiatif lokal, seperti donasi buku dan pembangunan perpustakaan komunitas, telah membantu memperkuat program pendidikan gratis. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Pendidikan gratis di Kabupaten Malang juga menjadi salah satu sarana untuk mengurangi kesenjangan sosial. Dengan memberikan akses yang sama kepada semua anak, kebijakan ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih setara. Anak-anak

dari keluarga miskin yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan untuk bersekolah kini dapat mengejar cita-cita mereka, yang pada akhirnya berkontribusi pada mobilitas sosial.

Namun, untuk memastikan keberlanjutan program ini, pemerintah daerah perlu mengatasi berbagai kendala yang ada. Salah satu solusi adalah meningkatkan alokasi dana pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan anggaran yang lebih besar, pemerintah dapat meningkatkan kualitas fasilitas sekolah, memberikan pelatihan tambahan bagi guru, dan memastikan distribusi dana yang lebih merata. Selain itu, pendidikan gratis di Kabupaten Malang juga perlu diintegrasikan dengan program pemberdayaan masyarakat. Misalnya, melalui program penyuluhan dan pelatihan, keluarga miskin dapat didorong untuk lebih memahami pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak mereka. Pendekatan ini dapat membantu mengubah pola pikir masyarakat dan meningkatkan partisipasi sekolah. Di masa depan, pendidikan gratis di Kabupaten Malang juga dapat diperluas untuk mencakup jenjang pendidikan menengah atas dan pendidikan kejuruan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin tidak hanya menyelesaikan pendidikan dasar, tetapi juga memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memasuki dunia kerja atau melanjutkan ke pendidikan tinggi.

Pendidikan gratis di Kabupaten Malang merupakan salah satu contoh kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, program ini telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Dengan perbaikan dan dukungan yang berkelanjutan, pendidikan gratis dapat menjadi fondasi penting bagi pembangunan manusia dan sosial di Kabupaten Malang.

c. Dampak Pendidikan Gratis Pada Kualitas Pendidikan di Kabupaten Malang

Kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Malang memiliki dampak positif, terutama dalam meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Dengan kebijakan ini, banyak siswa yang sebelumnya putus sekolah kini dapat melanjutkan pendidikan. Program BOS membantu sekolah menutup kebutuhan operasional dasar tanpa membebankan biaya kepada siswa. Meskipun demikian, kualitas pendidikan masih menjadi tantangan. Sebagian sekolah mengalami kekurangan dana untuk pengembangan kurikulum dan pelatihan guru. Kesenjangan kualitas antara sekolah di perkotaan dan pedesaan tetap signifikan, yang memengaruhi hasil pembelajaran siswa. Pendidikan gratis di Kabupaten Malang telah membawa dampak yang signifikan terhadap kualitas pendidikan, terutama dalam hal peningkatan akses bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Anak-anak dari keluarga miskin kini memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengenyam pendidikan formal hingga jenjang menengah pertama. Dampak ini terlihat dari meningkatnya angka partisipasi sekolah, yang menjadi salah satu indikator keberhasilan kebijakan ini dalam memperluas akses pendidikan.

Kebijakan pendidikan gratis juga membantu menurunkan angka putus sekolah, yang selama ini menjadi masalah utama di beberapa wilayah pedesaan di Kabupaten Malang. Dengan pembebasan biaya pendidikan, keluarga-keluarga miskin tidak lagi merasa terbebani secara finansial, sehingga anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan. Hal ini memberikan harapan baru bagi generasi muda untuk meraih pendidikan yang layak dan memutus lingkaran kemiskinan. Namun, dampak positif pendidikan gratis terhadap kualitas pendidikan tidak hanya terbatas pada peningkatan akses. Kebijakan ini juga mendorong sekolah untuk meningkatkan standar pengajaran dan hasil belajar siswa. Dana yang diperoleh melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional sekolah, seperti pengadaan

buku pelajaran, alat tulis, dan fasilitas pendukung lainnya. Dengan demikian, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif.

Meski begitu, kualitas pendidikan yang dihasilkan belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Malang. Sekolah-sekolah di daerah perkotaan cenderung memiliki fasilitas dan tenaga pengajar yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah-sekolah di daerah terpencil. Perbedaan ini memengaruhi capaian belajar siswa, di mana anak-anak di daerah pedesaan sering kali tertinggal secara akademik dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di perkotaan. Kesenjangan ini menjadi tantangan besar dalam memastikan dampak positif pendidikan gratis dapat dirasakan secara merata. Selain itu, meskipun pendidikan gratis berhasil meningkatkan jumlah siswa yang bersekolah, tantangan dalam hal kualitas pembelajaran tetap ada. Banyak sekolah yang masih menghadapi kendala seperti kekurangan guru yang kompeten dan minimnya program pelatihan guru. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas pengajaran, yang pada akhirnya memengaruhi prestasi akademik siswa. Dengan demikian, upaya peningkatan kualitas tenaga pengajar menjadi hal yang mendesak untuk diperhatikan.

Dampak pendidikan gratis juga terlihat dalam penguatan pendidikan karakter siswa. Dengan lebih banyak anak yang dapat mengakses pendidikan, sekolah menjadi tempat penting dalam menanamkan nilai-nilai positif seperti disiplin, tanggung jawab, dan toleransi. Pendidikan gratis memberi kesempatan kepada siswa dari berbagai latar belakang untuk belajar bersama, sehingga mendorong terciptanya lingkungan yang lebih inklusif dan harmonis. Dalam jangka panjang, pendidikan gratis diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Malang. Anak-anak yang mendapatkan pendidikan yang lebih baik akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di masa depan, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Hal ini juga berkontribusi pada pengurangan tingkat pengangguran di daerah tersebut, yang sering kali berkorelasi dengan rendahnya tingkat pendidikan.

Dampak positif ini tidak dapat dicapai tanpa dukungan infrastruktur yang memadai. Banyak sekolah di Kabupaten Malang, terutama di daerah pedesaan, masih menghadapi keterbatasan fasilitas. Beberapa sekolah bahkan tidak memiliki ruang kelas yang layak, laboratorium, atau perpustakaan. Kondisi ini membatasi peluang siswa untuk belajar dengan optimal dan mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Di sisi lain, pendidikan gratis juga berperan dalam meningkatkan partisipasi orang tua dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka. Dengan tidak adanya beban biaya sekolah, orang tua cenderung lebih termotivasi untuk memastikan anak-anak mereka terus bersekolah. Namun, partisipasi ini juga memerlukan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, terutama di kalangan keluarga miskin yang masih memandang pendidikan sebagai hal yang kurang relevan.

Dampak pendidikan gratis terhadap kualitas pendidikan di Kabupaten Malang juga dipengaruhi oleh manajemen sekolah dalam mengelola dana yang diterima. Pengelolaan yang efektif dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan, sementara pengelolaan yang kurang baik dapat menghambat manfaat yang seharusnya dirasakan oleh siswa. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan dana pendidikan untuk memastikan alokasinya sesuai dengan kebutuhan prioritas. Salah satu tantangan lain dalam mengukur dampak pendidikan gratis terhadap kualitas pendidikan adalah kurangnya data yang komprehensif dan akurat. Banyak sekolah yang belum memiliki sistem pencatatan yang baik untuk mengevaluasi capaian belajar siswa dan dampak kebijakan secara keseluruhan. Hal ini

membuat sulit bagi pemerintah untuk menilai sejauh mana kebijakan ini berhasil meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat lokal.

Program pendidikan gratis telah memberikan dampak nyata dalam menciptakan harapan baru bagi banyak keluarga miskin di Kabupaten Malang. Anak-anak yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan untuk bersekolah kini dapat bermimpi lebih tinggi dan mengejar cita-cita mereka. Hal ini menciptakan semangat baru di kalangan generasi muda untuk berjuang memperbaiki kehidupan mereka melalui pendidikan. Selain meningkatkan akses dan hasil belajar, pendidikan gratis juga membantu mengurangi tingkat diskriminasi di sekolah. Anak-anak dari keluarga miskin tidak lagi merasa terpinggirkan karena mereka memiliki akses yang sama terhadap fasilitas pendidikan. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana semua siswa dapat belajar dan berkembang bersama tanpa adanya stigma atau perbedaan perlakuan. Namun, untuk memastikan dampak pendidikan gratis dapat terus dirasakan, pemerintah Kabupaten Malang perlu mengatasi berbagai kendala yang ada, seperti kesenjangan fasilitas dan kekurangan guru. Upaya ini harus diiringi dengan peningkatan alokasi dana pendidikan, pembangunan infrastruktur sekolah, dan pelatihan bagi tenaga pendidik. Dengan langkah-langkah ini, pendidikan gratis dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap kualitas pendidikan.

Pendidikan gratis di Kabupaten Malang juga perlu dilengkapi dengan program-program pendukung, seperti bimbingan karir dan pelatihan kejuruan, untuk mempersiapkan siswa menghadapi dunia kerja. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi sarana untuk mendapatkan pengetahuan, tetapi juga menjadi alat untuk meningkatkan daya saing individu di pasar tenaga kerja. Secara keseluruhan, dampak pendidikan gratis di Kabupaten Malang sangatlah positif, meskipun masih ada banyak tantangan yang harus diatasi. Kebijakan ini tidak hanya membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, tetapi juga membantu menciptakan masyarakat yang lebih setara. Dengan dukungan yang berkelanjutan, pendidikan gratis dapat menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan manusia di Kabupaten Malang.

d. Kendala Pendidikan Gratis di Kabupaten Malang

Tantangan utama dalam pelaksanaan pendidikan gratis di Kabupaten Malang mencakup keterbatasan anggaran, distribusi dana yang tidak merata, dan rendahnya kualitas fasilitas pendidikan. Banyak sekolah yang masih bergantung pada dana BOS untuk kebutuhan operasional, yang sering kali tidak mencukupi untuk perbaikan infrastruktur dan pengembangan kapasitas guru. Kendala lainnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan. Beberapa keluarga miskin memprioritaskan anak-anak mereka untuk bekerja dibandingkan melanjutkan pendidikan. Di sisi lain, beban administrasi bagi sekolah dalam pengelolaan dana BOS juga menjadi isu yang memerlukan perhatian lebih. Meskipun pendidikan gratis di Kabupaten Malang telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses pendidikan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang cukup signifikan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan anggaran. Sekolah-sekolah di Kabupaten Malang sangat bergantung pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk menutupi kebutuhan operasional. Namun, alokasi dana tersebut sering kali tidak mencukupi, terutama di sekolah-sekolah dengan jumlah siswa yang besar. Akibatnya, banyak sekolah yang kesulitan memenuhi kebutuhan fasilitas pembelajaran yang memadai.

Distribusi dana pendidikan gratis tidak merata di seluruh wilayah Kabupaten Malang. Sekolah-sekolah di daerah terpencil sering kali menerima alokasi dana yang lebih kecil dibandingkan dengan sekolah di perkotaan, meskipun mereka membutuhkan dukungan lebih

besar untuk meningkatkan infrastruktur. Ketidakeimbangan ini menyebabkan terjadinya kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, yang menjadi salah satu tantangan besar dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis. Kendala lainnya adalah kurangnya fasilitas fisik yang memadai di banyak sekolah. Banyak sekolah di daerah pedesaan Kabupaten Malang masih kekurangan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas dasar lainnya. Dalam beberapa kasus, kondisi bangunan sekolah juga tidak layak untuk digunakan. Hal ini membatasi peluang siswa untuk belajar dengan baik dan memengaruhi efektivitas pembelajaran secara keseluruhan.

Kualitas tenaga pengajar juga menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pendidikan gratis. Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, menghadapi kekurangan guru yang kompeten. Selain itu, distribusi guru yang tidak merata menyebabkan beberapa sekolah memiliki jumlah tenaga pengajar yang berlebihan, sementara sekolah lain kekurangan. Ketidakeimbangan ini memengaruhi kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa. Masalah lain yang sering muncul adalah beban administrasi yang tinggi bagi pihak sekolah dalam mengelola dana BOS. Banyak kepala sekolah dan guru merasa kewalahan dengan persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk melaporkan penggunaan dana tersebut. Akibatnya, waktu yang seharusnya digunakan untuk kegiatan pembelajaran terpaksa dialokasikan untuk mengurus administrasi, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pengajaran.

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan juga menjadi salah satu kendala dalam implementasi pendidikan gratis. Beberapa keluarga miskin di Kabupaten Malang masih memandang pendidikan sebagai sesuatu yang kurang relevan, terutama ketika mereka membutuhkan anak-anak untuk membantu pekerjaan rumah atau bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Pandangan ini menyebabkan banyak anak yang tidak melanjutkan pendidikan meskipun biaya sekolah telah dihapuskan. Kendala budaya juga turut memengaruhi efektivitas pendidikan gratis. Di beberapa komunitas pedesaan, terdapat pola pikir bahwa pendidikan hanya penting hingga jenjang dasar, sementara jenjang menengah dianggap tidak memberikan manfaat yang signifikan. Hal ini menyebabkan rendahnya angka partisipasi di jenjang pendidikan menengah, meskipun kebijakan pendidikan gratis mencakup jenjang tersebut.

Minimnya program pelatihan bagi guru juga menjadi tantangan dalam memastikan kualitas pendidikan. Meskipun pendidikan gratis memberikan akses yang lebih luas, kualitas pembelajaran sering kali tidak optimal karena kurangnya pelatihan bagi guru untuk mengembangkan metode pengajaran yang inovatif. Hal ini berdampak pada rendahnya kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran secara mendalam. Selain itu, ada masalah dalam pemanfaatan dana BOS yang tidak selalu efektif. Beberapa sekolah masih mengalami kesulitan dalam merencanakan penggunaan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan prioritas. Dalam beberapa kasus, dana digunakan untuk kebutuhan yang kurang mendesak, sementara kebutuhan penting seperti perbaikan fasilitas belajar justru terabaikan.

Keterbatasan transportasi juga menjadi kendala besar, terutama bagi siswa di daerah terpencil. Meskipun biaya sekolah telah dihapuskan, banyak siswa masih menghadapi kesulitan untuk mencapai sekolah karena jarak yang jauh dan minimnya sarana transportasi. Hal ini menjadi hambatan utama bagi anak-anak di pedesaan untuk memanfaatkan kebijakan pendidikan gratis secara optimal. Dalam konteks ini, pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan gratis juga sering kali kurang optimal. Banyak sekolah yang tidak memiliki sistem pengawasan yang baik untuk memastikan dana digunakan dengan tepat. Kurangnya

transparansi dalam pengelolaan dana juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan, yang dapat mengurangi efektivitas kebijakan ini.

Kendala lain yang dihadapi adalah rendahnya partisipasi orang tua dalam mendukung pendidikan anak. Banyak orang tua, terutama dari keluarga miskin, kurang terlibat dalam proses pendidikan anak-anak mereka. Hal ini mengurangi motivasi siswa untuk belajar dan berdampak pada prestasi akademik mereka. Rendahnya partisipasi orang tua juga mencerminkan kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan sebagai investasi masa depan. Di sisi lain, pelaksanaan pendidikan gratis di Kabupaten Malang juga dihadapkan pada tantangan geografis. Kabupaten ini memiliki wilayah yang luas dengan banyak daerah terpencil yang sulit dijangkau. Infrastruktur yang buruk, seperti jalan yang tidak memadai, membuat akses ke sekolah menjadi sulit, terutama selama musim hujan. Tantangan geografis ini memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.

Krisis anggaran pendidikan juga sering kali berdampak pada kemampuan pemerintah daerah untuk mendukung pendidikan gratis secara berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, alokasi anggaran untuk sektor pendidikan sering kali terbagi dengan kebutuhan lain, sehingga memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan ini. Keterbatasan anggaran juga membuat sulit bagi pemerintah untuk memperluas program pendidikan gratis ke jenjang pendidikan menengah atas. Tantangan berikutnya adalah kurangnya dukungan dari sektor swasta dalam mendukung pendidikan gratis. Meskipun beberapa perusahaan telah berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), partisipasi sektor swasta secara keseluruhan masih terbatas. Padahal, dukungan dari sektor swasta dapat membantu mengatasi kekurangan fasilitas dan memperkuat program pendidikan di Kabupaten Malang.

Rendahnya kesadaran lingkungan sekolah terhadap pentingnya pendidikan berkelanjutan juga menjadi kendala. Beberapa sekolah belum sepenuhnya memahami konsep pendidikan berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada akses, tetapi juga pada kualitas. Akibatnya, inisiatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan sering kali kurang mendapat perhatian. Meski menghadapi banyak kendala, pendidikan gratis tetap menjadi kebijakan yang penting untuk mendorong pemerataan pendidikan di Kabupaten Malang. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan alokasi anggaran, penguatan kapasitas guru, dan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terpencil. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga menjadi kunci untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada.

Pada akhirnya, keberhasilan pendidikan gratis tidak hanya diukur dari jumlah siswa yang bersekolah, tetapi juga dari kualitas pendidikan yang mereka terima. Oleh karena itu, perhatian terhadap kendala-kendala yang ada harus menjadi prioritas dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di Kabupaten Malang. Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut, pendidikan gratis dapat menjadi alat yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah ini.

2. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, terlihat bahwa pendidikan gratis di Indonesia merupakan implementasi dari amanat konstitusional yang tercantum dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Selaras dengan itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan mandat kepada negara untuk menyelenggarakan pendidikan

dasar secara gratis bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, kebijakan ini tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam menghapus hambatan ekonomi dalam mengakses pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin. Sebagaimana diungkap oleh Supriadi dan Suryadi (2020), pendidikan gratis bertujuan untuk menciptakan keadilan pendidikan dan mengurangi kesenjangan sosial.

Selain itu, kebijakan pendidikan gratis turut diperkuat dengan program-program konkret seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang berperan besar dalam pembebasan biaya pendidikan, pengadaan buku, seragam, dan bahkan subsidi transportasi. Namun demikian, keberhasilan kebijakan ini tidak dapat dilepaskan dari peran serta masyarakat, sekolah, dan pemerintah daerah dalam implementasinya. Penelitian oleh Hadad et al. (2018) menunjukkan bahwa dukungan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pendidikan gratis.

Meskipun pendidikan gratis menjanjikan pemerataan akses pendidikan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan dana, infrastruktur yang belum memadai, dan ketimpangan kualitas guru antarwilayah. Di samping itu, tantangan lainnya adalah ketimpangan distribusi guru antara daerah perkotaan dan pedesaan, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian oleh Nugroho (2017) yang menyoroti bahwa guru berkualitas cenderung terkonsentrasi di kota-kota besar.

Kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Malang mencerminkan semangat nasional tersebut dengan menitikberatkan pada pendidikan dasar dan menengah pertama. Program ini dilaksanakan melalui alokasi dana dari APBD dan dana BOS, yang bertujuan untuk mengurangi angka putus sekolah di wilayah tersebut. Dampak positif kebijakan ini terlihat dari meningkatnya angka partisipasi sekolah, khususnya di daerah pedesaan. Studi oleh Fitriani dan Wahyudi (2021) menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan gratis di daerah rural dapat secara signifikan meningkatkan akses pendidikan dan menurunkan angka putus sekolah.

Walaupun demikian, Kabupaten Malang juga menghadapi tantangan yang mencerminkan kondisi nasional, seperti ketimpangan fasilitas pendidikan dan kekurangan tenaga pendidik. Beberapa sekolah di daerah pedalaman mengalami keterbatasan dalam hal ruang belajar, akses air bersih, dan fasilitas pembelajaran lainnya. Hambatan-hambatan ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan lokal dalam penerapan pendidikan gratis. Penelitian oleh Sari et al. (2019) menekankan pentingnya kebijakan yang responsif terhadap konteks lokal dalam mencapai efektivitas pendidikan.

Salah satu langkah strategis yang telah diambil oleh Kabupaten Malang adalah penyediaan bantuan langsung kepada siswa melalui program KIP. Namun, pelaksanaan program ini tidak lepas dari kendala, terutama dalam hal ketepatan sasaran. Kasus-kasus salah sasaran masih banyak terjadi, sebagaimana diungkapkan oleh Lestari dan Nugraha (2020), yang menekankan perlunya penguatan sistem verifikasi data penerima manfaat agar kebijakan dapat lebih efektif.

Program pendidikan gratis di Kabupaten Malang juga mencakup pendidikan inklusi, yang memberikan akses pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Dengan pendekatan ini, pendidikan tidak hanya diarahkan pada akses semata, melainkan juga pada pemerataan kualitas dan keadilan sosial. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Rahayu (2018), yang menekankan bahwa pendidikan inklusif merupakan pilar penting dalam menciptakan masyarakat yang berkeadilan.

Selain itu, pendidikan gratis turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Malang. Dengan adanya akses pendidikan yang lebih luas, siswa dari keluarga miskin memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Hal ini mendukung temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Pranoto (2022), yang menyatakan bahwa pendidikan dasar yang merata dapat menjadi jembatan untuk meningkatkan mobilitas sosial dan mengurangi kemiskinan struktural.

Namun demikian, tantangan dalam pengelolaan dana BOS menjadi salah satu isu penting. Banyak sekolah mengeluhkan tingginya beban administratif yang harus ditanggung, yang pada akhirnya dapat mengurangi fokus pada kegiatan pembelajaran. Sebagaimana diungkapkan oleh Kusumawati (2019), birokratisasi yang tinggi dalam pengelolaan dana pendidikan dapat menghambat efektivitas penggunaan dana dan mengganggu proses pembelajaran.

Di sisi lain, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat mengenai pentingnya pendidikan juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Beberapa keluarga di pedesaan masih menganggap bahwa pendidikan bukan prioritas utama, terutama ketika anak-anak dibutuhkan untuk membantu ekonomi keluarga. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan kultural dan sosialisasi kebijakan secara lebih intensif, sebagaimana disarankan oleh Hidayati (2021), yang menekankan pentingnya perubahan pola pikir masyarakat dalam mendukung keberhasilan kebijakan pendidikan.

Dalam konteks pengembangan pendidikan berkelanjutan, pendidikan gratis di Kabupaten Malang juga perlu didukung oleh program-program pelengkap seperti pelatihan guru, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kapasitas manajerial sekolah. Menurut hasil kajian oleh Santosa dan Wijayanti (2022), pelatihan yang berkelanjutan bagi guru memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran, terutama di sekolah-sekolah yang berada di wilayah tertinggal.

Pendidikan gratis di Kabupaten Malang juga mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan SDGs, khususnya pada tujuan keempat mengenai pendidikan berkualitas. Melalui berbagai kebijakan dan program pendukung, Kabupaten Malang telah menunjukkan bahwa pendidikan gratis bukan sekadar slogan, melainkan sebuah upaya strategis untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, adil, dan sejahtera. Penelitian oleh Susanti et al. (2023) memperkuat pandangan ini dengan menunjukkan bahwa pendidikan gratis yang dikombinasikan dengan intervensi sosial lainnya dapat mempercepat pembangunan manusia secara holistik.

Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika tersebut, jelas bahwa kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Malang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan, meskipun masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan sektor swasta sangat dibutuhkan untuk memperkuat keberlanjutan program ini. Dengan demikian, pendidikan gratis dapat menjadi fondasi kokoh bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan sosial-ekonomi yang lebih merata di masa depan.

Kesimpulan

Pendidikan gratis di Kabupaten Malang merupakan salah satu kebijakan strategis untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi. Kebijakan ini memberikan dampak signifikan terhadap angka partisipasi sekolah,

khususnya di jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama. Anak-anak dari keluarga miskin yang sebelumnya terhambat oleh kendala finansial kini memiliki peluang yang lebih besar untuk menyelesaikan pendidikan. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan gratis menjadi instrumen penting dalam membuka akses pendidikan yang lebih inklusif dan merata. Meski begitu, keberhasilan pendidikan gratis tidak hanya diukur dari peningkatan jumlah siswa yang bersekolah, tetapi juga dari kualitas pendidikan yang mereka terima. Dalam konteks ini, Kabupaten Malang masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya infrastruktur sekolah yang memadai, kesenjangan kualitas antara sekolah di perkotaan dan pedesaan, serta kekurangan tenaga pengajar yang kompeten. Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa meskipun akses pendidikan telah meningkat, upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masih perlu diperkuat.

Salah satu dampak positif yang jelas terlihat dari pendidikan gratis adalah peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, meskipun belum merata. Di beberapa wilayah pedesaan, pandangan konservatif tentang pendidikan masih menjadi tantangan, di mana keluarga miskin lebih memprioritaskan anak-anak untuk membantu pekerjaan domestik atau mencari penghasilan tambahan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan gratis perlu diiringi dengan program penyuluhan untuk mengubah paradigma masyarakat dan meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya pendidikan. Selain itu, pendidikan gratis telah memberikan dampak nyata dalam menurunkan angka putus sekolah di Kabupaten Malang. Dengan menghilangkan beban biaya sekolah, lebih banyak anak yang dapat melanjutkan pendidikan mereka tanpa khawatir akan kendala finansial. Namun, untuk memastikan keberlanjutan dampak ini, pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan distribusi sumber daya pendidikan yang merata di seluruh wilayah kabupaten.

Kendala-kendala dalam pelaksanaan pendidikan gratis, seperti keterbatasan dana BOS dan kesenjangan fasilitas, menjadi pengingat bahwa kebijakan ini memerlukan pengelolaan yang lebih efektif dan berorientasi pada kualitas. Sekolah-sekolah di daerah terpencil memerlukan perhatian khusus, baik dalam hal alokasi dana maupun penyediaan fasilitas dan pelatihan untuk tenaga pengajar. Dengan cara ini, pendidikan gratis dapat memberikan dampak yang lebih merata dan signifikan. Pendidikan gratis juga menciptakan peluang bagi sekolah untuk menjadi agen perubahan sosial. Melalui kebijakan ini, sekolah-sekolah dapat memainkan peran penting dalam menanamkan nilai-nilai inklusivitas dan memberdayakan siswa dari berbagai latar belakang. Anak-anak dari keluarga miskin kini memiliki kesempatan untuk belajar di lingkungan yang mendukung, tanpa merasa terpinggirkan karena perbedaan status ekonomi. Hal ini mendorong terbentuknya masyarakat yang lebih harmonis dan setara.

Namun, keberhasilan pendidikan gratis memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah memiliki peran utama dalam menyediakan regulasi, anggaran, dan pengawasan, sementara masyarakat dan sektor swasta dapat mendukung program ini melalui kontribusi berupa sumber daya tambahan atau inisiatif lokal yang inovatif. Kolaborasi ini penting untuk mengatasi berbagai kendala yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Dalam jangka panjang, pendidikan gratis diharapkan mampu memberikan dampak positif pada pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Malang. Anak-anak yang memperoleh pendidikan berkualitas akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup mereka dan keluarga mereka. Dengan demikian, pendidikan gratis dapat berkontribusi pada pemutusan rantai kemiskinan yang sering kali bersifat antargenerasi.

Secara keseluruhan, pendidikan gratis bukan hanya tentang penghapusan biaya sekolah, tetapi juga tentang menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Untuk mencapai hal ini, kebijakan pendidikan gratis harus terus dievaluasi dan disempurnakan agar dapat mengatasi berbagai tantangan yang ada. Perhatian terhadap aspek kualitas, pemerataan, dan keberlanjutan harus menjadi prioritas dalam implementasi kebijakan ini. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, pendidikan gratis di Kabupaten Malang dapat menjadi model bagi daerah lain dalam menciptakan sistem pendidikan yang adil dan merata. Kebijakan ini tidak hanya akan memberikan dampak positif bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, dengan menciptakan generasi yang lebih terdidik, berdaya saing, dan berkontribusi pada pembangunan bangsa.

Referensi

- Adhitya, B., Prabawa, A., & Kencana, H. (2022). Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, Sanitasi dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga Per Rumah Tangga terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.501>
- Ahkyar. (2016). Strategi Pengembangan Kompetensi Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Penanaman Nilai Karakter Bangsa di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Serambi Ilmu*, 22(1), 174–179.
- Amadi, A. S. M., Hasan, S., Rifanto, N. A., Wildan, M., Afifah, N. Q., & Nisak, N. M. (2023). Upaya Pemerintah dalam Menjamin Hak Pendidikan untuk Seluruh Masyarakat di Indonesia: Sebuah Fakta yang Signifikan. *Educatio*, 18(1), 161–171. <https://doi.org/10.29408/edc.v18i1.14798>
- Anis, I., Usman, J., & Arfah, S. R. (2021). Efektivitas Program Pelayanan Kolaborasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. *E-Journal UNIMUS*, 2, 3, 1105–1116.
- Dahlan, M. A. (2013). Kebijakan Pendidikan Gratis Di Tingkat Regional: Konsep dan Pelaksanaan di Kabupaten Rembang. *POLITIKA : Jurnal Ilmu Politik*, 2(2), 62–77.
- Hamid, S. A. (2012). Persepsi Orang Tua Siswa Dan Guru Tentang Pendidikan Dasar Gratis. *Jurnal Papatuzdu*, 4(1), 30–44.
- Iis Margiyanti, & Siti Tiara Maulia. (2023). Kebijakan Pendidikan Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun. *Jurnal Pendidikan Dan Sastra Inggris*, 3(1), 199–208. <https://doi.org/10.55606/jupensi.v3i1.1509>
- Khaidir, F., Amran, A., & Noor, I. A. (2023). Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar Melalui Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dalam Mewujudkan Sustainable Developments Goal's. *Attadib: Journal of Elementary Education Vol.7*, 7(2), 1–27.
- Kusumajati, & Kurniawan, T. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 166–176. <http://dx.doi.org/10.31289/jap.v9i2.2608><http://ojs.uma.ac.id/index.php/jap>
- Lorensa, D., Rohady Ramadhan, M., & Jabbar, A. (2023). *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan Strategi Pemrintah Daerah Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang*. 10, 150–158.

- Rahman, A., & Nasihin, A. (2020). Mampukah sekolah gratis mencapai pemenuhan standar nasional pendidikan? *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 102. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v9i1.2863>
- Safarah, A. A., & Wibowo, U. B. (2018). Program Zonasi Di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan Di Indonesia. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 21(2), 206. <https://doi.org/10.24252/lp.2018v21n2i6>
- Septiani, F. I., Rosiana, N., & Azzahra, A. (2024). *Dampak Makan Siang Gratis Pada Kondisi Keuangan Negara Dan Peningkatan Mutu Pendidikan The*. 243–255.
- Siregar, M. I. (2020). Inovasi Pendanaan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Islam di Indonesia. *At-Ta'Dib*, 123–141. <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/tadib/article/view/30>
- Sudarman, H., Sahabuddin, C., & Latief, A. (2020). Analisis Penerapan Program Pendidikan Gratis Terhadap Masyarakat Miskin Di Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar. *Journal Pegguruang: Conference Series*, 2(2), 93. <https://doi.org/10.35329/jp.v2i2.1651>
- Thalib, M. D. (2019). Problematika Putus Sekolah dan Pengangguran (Analisis Sosial Pendidikan). *Jurnal Al-Ishlah*, 11(20), 1–16.
- Tumundo, E. C., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2023). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pendidikan Gratis Di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Governance*, 3(1), 1–7. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/38156/34866>
- Winigsih, L. H., Penelitian, P., Pendidikan, K., & Kemendikbud, B. (2017). Program Pendidikan Menengah Universal Sebagai Persiapan Wajib Belajar Dua Belas Tahun the Universal Education Program in Preparing for. *Cakrawala Pendidikan*, 36(1), 1–12.